

TAJUK RENCANA

Ciptakan Ruang Aman Anak dari Kekerasan Seksual

BUPATI Gunungkidul Sunaryanta memerintahkan Dinas Pendidikan setempat melakukan penanganan serius terhadap DA, oknum guru SD di Kepanewonan Wonosari yang diduga melakukan pelecehan seksual pada siswinya. "Jika ditemukan adanya bukti agar diberikan sanksi berat sampai dengan pemecatan..."

Di dalam filosofi Jawa, 'guru' adalah *digugu lan ditiru*. Namun tindakan oknum guru DA itu jelas tidak bisa ditiru karena bukan hanya pelanggaran namun juga amoral. Apalagi dia memang sudah mengakui perbuatannya, membuat pernyataan penyesalan, pernyataan meminta maaf dan tidak akan mengulangi. Sekolah memberi sanksi pindah mengajar di kelas lain. Kebijakan yang membuat membuat complaint banyak pihak, karena sanksi tidak berdampak efek jera. (KR 11/2).

Kasus amoral dan biadab ini menyusul pemberitaan media mengenai ketua remaja masjid di Kawasan Sleman yang melakukan pencabulan. Mirisnya, pencabulan terhadap anak lelaki di bawah umur tersebut baru terungkap, padahal sudah dilakukan sejak 2013. Kian miris, perbuatan AS warga Gamping Godean tersebut ada yang dilakukan di masjid, saat korban tertidur. (KR, 7/2).

Dua kasus kejahatan seksual yang terungkap di DIY, awal 2023 hanya sedikit dari pelbagai kasus kekerasan seksual yang dialami anak-anak. Ketua Dewan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listiyarti dalam keterangan tertulis 2 Januari 2023 yang dikutip media mengungkap adanya 117 pelajar korban kekerasan seksual tahun 2022. Dari jumlah itu, 17 kasus diproses secara hukum dengan korban, 2 pelajar SD, 3 (SMP), 2 (SMA) dan 5 (pesantren). Dari 19 pelaku di satuan pendidikan tersebut, 73,68% adalah guru.

Yang menjadi terasi miris, kisah di DIY ini juga menunjukkan bahwa korban pelecehan seksual juga bisa dialami korban anak lelaki dengan pelaku lelaki. Dan keja-

hatan seksual ini juga terjadi di sekolah, masjid dan tentu tidak sedikit yang terjadi di rumah. Artinya kejahatan seksual yang mengancam anak-anak sangat mungkin terjadi di mana saja, dengan korban siapa saja. Sedang pelakunya? Bisa adalah orang-orang yang dekat atau dikenal korban : guru, ketua komunitas remaja, tokoh masyarakat, selain tentu orang tua dan saudara. Realita yang menunjukkan, semakin tidak ada ruang yang aman bagi anak-anak karena kejahatan seksual mengancam dimanapun.

Pasal 19 Konvensi Hak Anak versi Anak menyebutkan : *tiap anak berhak mendapat perlindungan yang layak, dilindungi dari kekerasan, penganiayaan dan pengabaian*. Artinya, menjaga anak-anak dari kekerasan terlebih kekerasan seksual, adalah kewajiban bukan hanya orang tua. Negara bahkan wajib hadir dengan pelbagai kebijakan yang berpihak untuk keamanan dan kenyamanan anak. Bukan hanya regulasi, namun juga anggaran sebagai komitmennya memberikan pelayanan dan melindungi perempuan dan anak. Hanya fact sheet UNICEF 'Perlindungan Anak' menyebutkan, anggaran pemerintah didedikasikan untuk melindungi anak-anak dari kekerasan hanya kurang dari 0,1% dari total anggaran.

Anak adalah masa depan. Maka menciptakan ruang aman dari kekerasan seksual terhadap anak yang harus menjadi kebutuhan dan diprioritaskan, ketika predator anak mengintip anak di mana-mana. Sikap dan perilaku yang terus melanggar kekerasan terhadap anak, harus ditangani melalui inisiatif perubahan social dan perilaku. Bagi DIY, ini saatnya memberi makna pada raihannya penghargaan Daerah Ramah Perempuan dan Layanan Anak (DRPLA). Berpredikat Kota Pendidikan, Kota Budaya bahkan Kota Pariwisata, DIY layak menjadi percontohan menciptakan ruang aman dari kekerasan seksual terhadap anak. Semua demi masa depan terbaik bagi anak. □f

UIN Sunan Kalijaga dan Simpul Keragaman

Fathorrahman Ghufron & Arifah Khusrayani

Kalijaga akan memberikan doktor kehormatan (*doctor honoris causa*) kepada tiga komunitas keagamaan yang selama ini mempunyai kiprah dan peran yang kuat dalam menyuburkan dimensi keragaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya.

Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah sebagai kakak tertua yang berada dalam satu perguruan ide-

laku Ketua PP Muhammadiyah periode 2005-2010) dan Cardinal Miguel Angel Ayuso Guixot (selaku Presiden Badan Keapausan untuk Dialog Lintas Agama dan Vatikan).

Menjembatani Pesan

Dalam kaitan ini, penganugerahan doktor kehormatan kepada ketiga tokoh tersebut menjadi momentum relasional yang bisa menjembatani pesan moral 'kebersamaan kemanusiaan dalam perbedaan' dan perbedaan kemanusiaan dalam kebersamaan' di ruang publik..

Setidaknya, melalui ketiga tokoh yang selama ini menjadi panutan dan teladan masyarakat, pesan moral tersebut bisa menggelinding dan bersama-sama dikawal ke berbagai lapisan kelompok sosial. Sehingga, melalui sinergitas peran penyediaan pesan moral yang dilakukan berbagai simpul masyarakat, maka keragaman yang sudah ditakdirkan sebagai fitrah kehidupan akan tumbuh subur seiring dengan menguatnya kehendak kemanusiaan untuk berbeda dalam kebersamaan dan sekaligus bersama dalam perbedaan.

Semoga, penganugerahan doktor kehormatan kepada tiga tokoh di tiga komunitas tersebut menjadi inspirasi. Sekaligus meroketnya kekap sayap perdamaiannya di Indonesia dan berbagai penjuru dunia. □f

*) **Fathorrahman Ghufron**,
Wakil Dekan bidang 3 Fak Sainstek
UIN Sunan Kalijaga

*) **Arifah Khusrayani**,
Wakil Dekan bidang 2 Fak Sainstek
UIN Sunan Kalijaga



KR-JOKO SANTOSO

ologis dengan NU, dan Nasrani yang selama ini turut berkontribusi bagi tegaknya Republik Indonesia merupakan tiga komunitas keagamaan yang dipandang sebagai pilar keragaman. Bahkan bersama komunitas lain yang berada dalam satu nafas pergerakan, ketiga komunitas tersebut menjadi tulang punggung Indonesia dalam menghargai perbedaan sekaligus mengedepankan perdamaian.

Dari rekam jejak yang sudah diperankan ketiga komunitas, tidak terlalu berlebihan bila UIN Sunan Kalijaga akan mendaulat beberapa tokoh di tiga komunitas sebagai penerima doktor kehormatan. Ketiga nama itu ialah KH Yahya Chalil Staquf (selaku Ketua Umum PBNU), dr Sudibyo Markus (se-

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opini-kr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Pernikahan Dini di DIY

Anif Muchlashin

membutuhkan gizi ekstra pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Gizi buruk dan stunting sebagai akhir dari cerita, dan orangtua yang tidak bisa mengatasi masalah ekonomi keluarga lebih rentan masuk dalam lingkaran keluarga miskin.

Dispensasi

Berdasarkan data dari KUA Kemenag DIY, pada tahun 2022 terjadi 556 orang yang menikah dengan dispensasi itu terdiri dari 188 orang laki-laki dan 368 orang perempuan. Angka tahun 2022 cukup turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 sebanyak 948 kejadian. Sedangkan pada tahun 2021 turun menjadi 757 kejadian.

Berdasar Susenas yang dilakukan BPS 2020 posisi DIY dalam angka nikah muda berada di 2 terendah nasional setelah DKI Jakarta yakni berada di angka 1,83. Angka ini cenderung turun di tahun 2018 sebanyak 6,02, dan tahun 2019 3,06. Pencapaian baik ini harus dapat dipertahankan secara kolektif. Pengadilan Tinggi Agama DIY menyebutkan sebagian besar penyebab perkawinan di bawah umur dikarenakan perilaku remaja yakni kehamilan yang tidak dikehendaki (KTD). Karena itu perlu upaya terpadu untuk mencegah perkawinan anak salah satunya dengan upaya pendewasaan usia perkawinan (PUP).

PUP adalah salah satu upaya dalam peningkatan usia perkawinan pada perempuan

PERKAWINAN pada dasarnya diartikan sebagai ikatan sah secara lahir batin antara seorang lelaki - perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME (UU No 1 Tahun 1974-Pasal 1). Batas usia minim untuk seorang pria dan wanita melaksanakan perkawinan adalah 19 tahun yang hal ini sudah diatur dalam Undang-undang Perkawinan 16 tahun 2019 pasal 7 yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974. Jika seorang lelaki dan perempuan yang menikah di bawah usia 19 tahun maka dapat dikategorikan dalam nikah dini.

Dampak buruk dari pernikahan di bawah umur yang utama dari segi kesehatan. Bayi dari perempuan hamil yang usianya di bawah 20 tahun lebih rentan meninggal dalam 28 hari pertama dibandingkan dengan bayi yang lahir dari Ibu yang berusia 20-29 tahun. Selain itu rentannya bayi terhadap stunting, dan risiko berat badan bayi lahir rendah (BBLR) pun kerap terjadi. Dampak buruk yang kedua adalah urusan rumah tangga. Orang tua yang masih masuk dalam kategori anak-anak secara psikologis belum stabil emosinya sehingga lebih rentan terhadap perilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Anak dalam usia di bawah 19 tahun seharusnya berada di ruang-ruang sekolah untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan.

Nikah dini dari sisi ekonomi juga berkaitan. Orang tua yang belum memiliki pekerjaan atau bekerja dengan upah rendah menyebabkan ancaman keberlanjutan dari sisi keluarga. Kebutuhan keluarga yang tidak tercukupi utamanya urusan pangan akan berpengaruh pada kebutuhan gizi Ibu dan bayi yang sangat

usia 21 tahun, laki-laki 25 tahun. Umur yang ditetapkan ini telah dirasa mampu mengarahkan kehidupan baik dari sisi kesehatan maupun dari segi emosionalnya. Program PUP ini juga sudah diintegrasikan dengan program keluarga secara nasional berencana yang diharapkan dapat menurunkan pertumbuhan penduduk.

Upaya PUP ini tentu tidak bisa hanya dilakukan pemerintah, tetapi perlu upaya masyarakat. Berdasarkan data dari BPS anak perempuan yang menikah di bawah umur lebih dominan. Sehingga masyarakat yang memiliki anak perempuan harus lebih di jaga agar dapat mewujudkan cita-citanya sebelum akhirnya memutuskan untuk berkeluarga.

*) **Anif Muchlashin**, *Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Bappeda DIY, Satgas Stunting-BKKBN DIY*

Pojok KR

Indonesia kirim bantuan kemanusiaan ke Turki
-- Saling membantu yang sedang kena musibah

BP2MI dorong mahasiswa jadi Pekerja Migran Indonesia
-- Tentu yang dikirim pekerja profesional

Bengawan Solo meluap, warga mengungsi
-- Semoga segera teratasi

Beraba

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik

Naskah dikirim Email atau WA

pikiranpembaca@gmail.com

0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Magnet Titik Nol Kilometer Yoga

KETIKA viral aksi kejahatan di titik nol km Yoga, semua seakan tergugah. Bukan hanya warga Yoga namun juga teman-teman yang berada di luar kota Yoga. Cobalah tengok WhatsApp Grup (WAG) yang heterogen apalagi grup teman kuliah Anda, bila Anda pernah berada di salah satu perguruan tinggi di DIY. Alumni yang kini menyebar, sebagian tentu masih merasa *handarbeni* Ngayogyakarta Hadiningrat.

Maka di WAG tersebut akan muncul pelbagai pertanyaan : "Kok bisa, aksi kejahatan di dekat Gedung Negara / Gedung Kepresidenan?". Atau : "Bukankah di dekat situ ada pos polisi?" kemudian lagi : "Bukankah itu dekat dengan kawasan Malioboro yang

ramai?" dan lainnya. Pertanyaan yang terlontar bernada tidak percaya. Soal pos polisi, mungkin Yoga namun juga tidak melihat perlu diketahui, di kawasan tersebut pos polisi sudah dibongkar dan tidak ada lagi.

Magnet serta pesona titik nol kilometer memang luar biasa. Semua melihat, aksi kejahatan ini sangat merusak citra Yoga sebagai kota pelajar, kota wisata. Apalagi, selfie atau welfie di titik nol kilometer sekarang sedang sangat trend. Bersyukur, pelaku muncul pelbagai pertanyaan : "Kok bisa, aksi kejahatan di dekat Gedung Negara / Gedung Kepresidenan?". Atau : "Bukankah di dekat situ ada pos polisi?" kemudian lagi : "Bukankah itu dekat dengan kawasan Malioboro yang

*) **Tatik**, *Sumber Banjarsari Surakarta*

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Kedaulatan Rakyat

Pemimpin Umum: M Wirnon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogo. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustitwi, Dra Prabandari, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afifiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Eddy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafiis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyanti.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankr23@yahoo.com, iklankr13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris)...Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm...Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi DI s/d SI, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)